

## ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN WILAYAH KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2019

**Lailatul Fitriyah**

Program Studi S1 Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,  
Universitas Negeri Surabaya, Kampus Ketintang, Surabaya, 60231  
Email: [lailatul.17081324029@mhs.unesa.ac.id](mailto:lailatul.17081324029@mhs.unesa.ac.id)

**Prayudi Setiawan Prabowo**

Program Studi S1 Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,  
Universitas Negeri Surabaya, Kampus Ketintang, Surabaya, 60231  
Email: [prayudiprabowo@unesa.ac.id](mailto:prayudiprabowo@unesa.ac.id)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketimpangan antar kota di Provinsi Jawa Timur, mengidentifikasi sektor unggulan tiap kota, dan mengetahui apakah terdapat gejala trickle down effect pada tiap kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2019. Dikarenakan beberapa perkotaan yang seharusnya lebih maju jika dibandingkan dengan kabupaten, memiliki produk domestik bruto yang lebih rendah daripada kabupaten maka daerah antar kota Provinsi Jawa Timur menarik untuk diteliti lebih jauh. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan matematis dan menggunakan alat analisis gabungan yaitu Indeks Williamson, Tipologi Klassen, Location Quotient, dan Shift Share. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan pendapatan antar kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2019 dengan rata-rata nilai indeks williamson sebesar 0,8. Untuk hasil analisis tipologi kelas menunjukkan adanya 3 kota pada kuadran I (daerah maju), 2 kota pada kuadran III (daerah berkembang), dan 4 kota pada kuadran IV (daerah tertinggal). Lalu, hasil analisis location quotient dan shift share menunjukkan adanya beberapa sektor basis yang memiliki pertumbuhan sektor yang lebih cepat jika dibandingkan dengan daerah lainnya.*

**Kata Kunci :** *Ketimpangan Pendapatan, Tipologi Klassen, Location Quotient, Shift Share*

### Abstract

*This research purposes are to determine whether there are disparities between cities in East Java Province, identify the leading sectors of each city, and determine whether there are symptoms of trickle down effect in each city in East Java Province 2010-2019. Because some city that should be more advanced than districts have a lower gross domestic product than districts, the inter-city areas of East Java Province are interesting for further research. The type of research is descriptive quantitative with a mathematical approach and uses a combined analysis tool namely Williamson Index, Klassen Typology, Location Quotient, and Shift Share. The results of the research show that there is income inequality between cities in East Java Province 2010-2019 with an average Williamson index value of 0.8. The results of the classification typology analysis show that there are 3 cities in quadrant I (developed areas), 2 cities in quadrant III (developing areas), and 4 cities in quadrant IV. (disadvantaged areas). Then, the results of the location quotient and shift share analysis show that there are several basic sectors that have faster sector growth compared to other regions.*

**How to cite:** Fitriyah, Lailatul, & Prabowo, P. S.(2021). Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Pengembangan Sektor Unggulan Wilayah Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2019. *INDEPENDENT : Journal Of Economics*, 1(2), 206-217.

**Keywords:** *Income Inequality, Klassen Typology, Location Quotient, Shift Share*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak sekali wilayah yang berbeda-beda baik dalam segi budaya, struktur sosial dan bahkan perekonomiannya. Karena banyaknya perbedaan, pemerintah pusat belum mampu memajukan tiap daerah di Indonesia secara optimal. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk dapat membangun dan memajukan wilayahnya masing-masing. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana pemerintah dan penduduknya saling berkolaborasi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut (Subandi, 2011) dalam Widi Asih (2015:16).

Pembangunan daerah tidak hanya berfokus terhadap penyediaan sarana prasarana namun juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menyiapkan lapangan kerja, menyediakan pendidikan dan membenahan struktur sosial masyarakat. Salah satu faktor keberhasilan dari pembangunan daerah dapat dilihat pada laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sehingga, pemerintah daerah harus memiliki target laju pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai setiap tahunnya.

Dalam rangka membangun suatu wilayah, pemerintah daerah diharuskan untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis sektor-sektor yang berpotensi menjadi nilai tambah daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Menurut Tarigan (2005), teori basis ekonomi dapat digunakan untuk menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah berdasarkan pada besarnya pertambahan nilai ekspor dari wilayah tersebut yang dapat dibedakan menjadi sektor basis (sektor yang mampu mengeksport barang atau jasa yang dihasilkan) dan non basis (sektor yang hanya dapat menghasilkan barang atau jasa untuk penduduk wilayah itu sendiri). Salah satu faktor yang menandakan adanya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah yaitu dengan meningkatnya produk domestik regional bruto (PDRB) wilayah tersebut. Dengan meningkatnya PDRB maka kesejahteraan di suatu wilayah juga akan lebih tinggi. Selain itu, penduduk juga akan bertambah seiring dengan meningkatnya kesejahteraan dan mengakibatkan penambahan pendapatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjadikan suatu daerah dapat mengatasi masalah kemiskinan yang dimana masih banyak penduduk yang berpenghasilan dibawah standar kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan ekonomi akan dinyatakan mengalami kegagalan jika belum bisa mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut. Sehingga pertumbuhan PDRB yang cepat tidak berarti akan dapat meningkatkan taraf hidup penduduknya. Dengan kata lain, manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak didapatkan oleh penduduk miskin sebagaimana yang diharapkan dimana hal ini juga disebut sebagai efek cucuran kebawah atau *Trickle down effect*.

Selama pembangunan, pemerintah daerah mengharapkan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai distribusi pendapatan yang merata. Akan tetapi, dalam prakteknya kedua hal tersebut sulit dicapai. Hal ini terjadi dikarenakan *trade off* atau pertukaran antara distribusi pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan wilayah. Menurut Sjafrizal (2018), Ketimpangan ekonomi antar daerah yaitu perbedaan antara daerah maju dan daerah tertinggal diukur dengan tingkat PDRB perkapita antar daerah. Hal ini juga tidak terlepas dari perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, dan kemampuan dalam mengelola sumber daya tersebut.

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu wilayah dengan Kabupaten atau Kota terbanyak di Indonesia tidak terlepas dari masalah ketimpangan wilayah. Provinsi Jawa Timur yang memiliki 29 Kabupaten dan 9 Kota ini juga memiliki berbagai permasalahan mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang tidak merata pada setiap daerahnya. Walaupun memiliki permasalahan ketimpangan, Provinsi Jawa Timur termasuk provinsi yang berpotensi di sektor-sektor wilayahnya dan memiliki peluang berkembang yang cukup tinggi.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mendefinisikan kawasan perkotaan sebagai wilayah yang memiliki kegiatan utama yaitu bukan pertanian dan dengan susunan fungsi sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, wilayah kota memiliki lebih banyak penduduk karena mempunyai fungsi sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan dibidang jasa. Selain itu, sektor utama yang dikembangkan bukanlah pertanian melainkan ke sektor industri. Hal inilah yang seharusnya menjadikan wilayah perkotaan sebagai wilayah dengan pendapatan perkapita paling tinggi di Jawa Timur. Namun, dalam prakteknya banyak sekali wilayah kota yang masih memiliki pendapatan perkapita lebih kecil dibanding wilayah kabupaten.

Menurut para ekonom perkotaan, keberhasilan dari suatu kota dapat dilihat dari pendapatan yang tinggi dan bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah. Karena itu, Penduduk akan memilih berpindah ke kota dengan pendapatan lebih tinggi. Jika hal ini terus menerus terjadi, maka perekonomian kota dengan rata-rata pendapatannya yang rendah akan lesu dan tingkat produktivitasnya juga menurun. Sementara kota dengan tingkat pendapatan yang tinggi akan mengalami penambahan jumlah penduduk dan tingkat produktivitas yang tinggi. Karena wilayah perkotaan yang relatif kecil, maka pembangunan tempat usaha pun terbatas dan lapangan pekerjaan juga terbatas. Hal ini akan mengakibatkan permasalahan baru yaitu pengangguran dan kemiskinan.

Produk domestik regional bruto perkapita disebut juga sebagai pengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Jika PDRB yang dihasilkan berambah besar maka tingkat kesejahteraan penduduk di daerah tersebut juga semakin tinggi dan begitu pula sebaliknya. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2020), Kota Kediri telah menghasilkan PDRB perkapita tertinggi di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2010 hingga 2019 dengan nilai rata-rata sebesar Rp258.167.410 dan selanjutnya oleh Kota Surabaya sebagai PDRB perkapita tertinggi kedua dengan nilai rata-rata sebesar Rp111.320.140. Sementara untuk

kota-kota lainnya, seperti Kota Malang yang berada pada urutan ketiga memiliki PDRB perkapita dengan nilai rata-rata sebesar Rp 48.494.640 dimana perbedaan nilai PDRB perkapita antarkota cukup besar. Selain itu, beberapa wilayah kota yang lebih berfokus pada sektor permukiman, perdagangan, dan distribusi pelayanan jasa sebagaimana yang tertera pada UU No. 26 Tahun 2007 masih memiliki nilai PDRB perkapita lebih kecil jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang masih berfokus pada sektor pertanian. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat ketimpangan pendapatan antar kota di wilayah Jawa Timur. Jika disparitas pendapatan ini terus-menerus dibiarkan, maka penduduk kota yang memiliki pendapatan *relative* lebih kecil akan berpindah ke kota yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan kota-kota seperti Surabaya dan Kediri akan mengalami kepadatan penduduk. Di kota besar, hal ini akan mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan sementara di kota yang ditinggalkan akan mengalami kurangnya tenaga kerja. Jika hal ini terus-menerus terjadi maka akan mengakibatkan lebih besarnya ketimpangan yang sudah terjadi sehingga diperlukannya gerak cepat dari pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang tepat.

Berdasarkan uraian tersebut, ketimpangan inilah yang merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan karena dapat menimbulkan terjadinya permasalahan baru dalam wilayah tersebut seperti pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan yang terjadi antar kota di wilayah Jawa Timur dan menentukan potensi sektor unggulan di wilayah tersebut dengan harapan target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dan meningkatkan pendapatan penduduk sehingga akan mengurangi ketimpangan yang terjadi.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan matematis yang menggunakan data panel dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 9 Kota di Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Malang, Batu, Kediri, Probolinggo, Mojokerto, Madiun, Blitar dan Pasuruan dengan rentang waktu 10 tahun dari tahun 2010 hingga 2019. Data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan alat analisis sebagai berikut:

### 1. Analisis Indeks Williamson

Untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan yang terjadi antar kota dengan menggunakan perhitungan indeks Williamson. Data yang digunakan dalam perhitungannya adalah data PDRB per kapita dan jumlah penduduk wilayah tersebut. Rumus yang akan digunakan dari *Williamson Index* adalah sebagai berikut (Sjafrizal, 2018):

$$cv_w = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - y)^2 f_i / n}}{y} \quad (1)$$

Keterangan

- $cv_w$  = Indeks Williamson
- $f_i$  = Jumlah penduduk kota ke-i (jiwa)
- $n$  = Jumlah penduduk (jiwa)
- $Y_i$  = PDRB per kapita kota ke-i (Rupiah)

$y$  = PDRB per kapita rata-rata provinsi (Rupiah)

Sehingga hasil perhitungan dari indeks ini akan bergerak dari angka 0 hingga 1 yang dimana jika hasil indeks Williamson kurang dari 0,3 maka ketimpangan cenderung rendah bahkan merata. Lalu, jika hasil indeks Williamson diantara angka 0,3 hingga 0,5 maka ketimpangan yang dialami berada pada posisi sedang. Dan jika hasil indeks Williamson lebih dari 0,5 maka ketimpangan yang dialami daerah tersebut cenderung tinggi.

## 2. Analisis Tipologi Klassen

Menurut Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) Universitas Gajah Mada (2006), teknik analisis tipologi kelas menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan wilayah dan pendekatan sektoral. Dalam penelitian ini, untuk mengelompokkan beberapa daerah kedalam daerah maju, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang, dan daerah tertinggal dengan menggunakan matrik tipologi kelas pendekatan wilayah dimana menggunakan 2 data yaitu laju pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan tingkat pendapatan perkapita daerah tersebut sebagai sumbu horizontal.

**Tabel 1. Tipologi Klassen Pendekatan Wilayah**

Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju pertumbuhan di atas rata-rata.	Laju pertumbuhan di bawah rata-rata.
Pendapatan Perkapita	Daerah Maju	Daerah Maju tapi tertekan
Pendapatan per kapita di atas rata-rata.	Daerah Berkembang	Daerah Tertinggal
Pendapatan per kapita di bawah rata-rata.		

Sumber: Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) UGM, 2006

Dalam tipologi kelas, pendekatan wilayah telah menghasilkan 4 kriteria yang dimana setiap daerah memiliki karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu (1) Daerah maju atau *rapid growth region* di kuadran I merupakan daerah yang paling maju, baik dari segi kecepatan pertumbuhan maupun tingkat pembangunan. (2) Daerah maju tapi tertekan atau *retarded region* di kuadran II merupakan daerah yang relatif maju tapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat kegiatan utama dari daerah tersebut tertekan. (3) Daerah berkembang atau *growing region* di kuadran III merupakan daerah yang mempunyai potensi berkembang yang sangat besar, tapi masih belum dikelola dengan baik. (4) Daerah tertinggal atau *relatively backward region* di kuadran IV merupakan daerah dengan tingkat kesejahteraan penduduknya maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih relatif rendah.

## 3. Analisis Location Quotient

Teknik analisis Location Quotient digunakan untuk membandingkan seberapa besar peranan antara sektor di suatu daerah terhadap sektor yang sama secara nasional. Data yang digunakan pada analisis ini yaitu data produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010. Analisis

LQ digunakan untuk mengetahui sektor basis yang dimiliki suatu daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai LQ adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{\frac{x_i}{PDRB}}{\frac{X_i}{PNB}} \quad (2)$$

Di mana:

- $x_i$  = Nilai tambah sektor i di suatu daerah
- PDRB = Produk domestik regional bruto
- $X_i$  = Nilai tambah sektor i secara nasional
- PNB = Produk nasional bruto

Kriteria pengukuran Location Quotient menurut Tarigan (2015), yaitu jika  $LQ > 1$  maka disebut sektor basis yang berarti peran sektor tersebut lebih besar dari peran sektor yang sama secara nasional. Sedangkan jika  $LQ < 1$  artinya sektor non basis, yang berarti peran sektor tersebut lebih kecil dari peran sektor yang sama secara nasional.

#### 4. Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift Share* digunakan untuk dapat mengetahui perkembangan dan potensi suatu sektor dibanding sektor lain dapat membandingkan laju perekonomian daerah. Data yang dibutuhkan dalam menganalisis *Shift Share* dengan menggunakan dua periode data PDRB secara time series yaitu tahun 2010 dan tahun 2019. Sebagai salah satu cara perhitungan yang biasanya digunakan untuk menyatakan perubahan struktur ekonomi daerah yang berkaitan erat dengan 3 hal berikut: (1) Pertumbuhan ekonomi nasional atau *national growth effect*, yang menyatakan besaran pengaruh pertumbuhan ekonomi secara nasional terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. (2) Pergeseran proporsional atau *proportional shift*, yang dapat mengukur perubahan suatu sektor di daerah dan akan dibandingkan sektor yang sama di daerah atasnya seperti provinsi atau nasional. (3) Pergeseran diferensial (*differential shift*), yang mengetahui seberapa jauh kemampuan suatu sektor memiliki daya saing dengan sektor sama di daerah lain. Rumus yang digunakan pada analisis *shift share* (Glasson, 1990) dalam Kharisma Bintang (2019) adalah sebagai berikut:

$$G_j = Y_{jt} - Y_{jo} \quad (3)$$

$$N_j = Y_{jo} \left( \frac{Y_t}{Y_o} \right) - Y_{jo} \quad (4)$$

$$(P + D)_j = Y_{jt} - \left( \frac{Y_t}{Y_o} \right) Y_{jo} \quad (5)$$

$$P_j = \sum i \left[ \left( \frac{Y_{it}}{Y_{io}} \right) - \left( \frac{Y_t}{Y_o} \right) \right] Y_{ijo} \quad (6)$$

$$D_j = \sum t \left[ Y_{ijt} - \left( \frac{Y_{it}}{Y_{io}} \right) Y_{ijo} \right] \quad (7)$$

Keterangan :

- $N_j$  = Komponen *Share*
- $P_j$  = *Proportional Shift*
- $D_j$  = *Diferential Shift*
- $G_j$  = Pertumbuhan PDRB Total
- $Y$  = PDRB Total Provinsi Jawa Timur
- $o,t$  = Periode Awal dan Akhir

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Indeks Williamson

Berdasarkan analisis dengan menggunakan Indeks Williamson, pada tahun 2010 nilai IW berada pada posisi 0,8329 dan turun pada tahun 2011 menjadi 0,8319. Namun, pada tahun 2012 nilai IW naik lagi ke angka 0,8333 lalu turun menjadi 0,8325 pada tahun 2013. Nilai IW mulai naik kembali secara signifikan dan terus menerus pada tahun 2014 hingga 2019 mencapai 0,8443. Sementara itu, nilai IW menunjukkan angka ketimpangan antara kota satu dengan yang lainnya di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2010-2019 memiliki rata-rata sebesar 0,8. Dimana pengukuran indeks Williamson hanya pada angka 0 hingga 1 sehingga dapat disimpulkan ketimpangan di 9 Kota di Jawa Timur sangat timpang. Ketimpangan yang terjadi diantara wilayah kota di Jawa Timur ini merupakan dampak dari tingginya pendapatan hanya di beberapa kota seperti Surabaya dan Kediri sedangkan di kota lainnya memiliki pendapatan yang tergolong *relative* rendah.

**Tabel 2. Hasil Indeks Williamson Antar Kota**

No.	Kota	Ketimpangan Pendapatan
1	Kota Kediri	0.152515329
2	Kota Blitar	0.016451896
3	Kota Malang	0.050289256
4	Kota Probolinggo	0.02659947
5	Kota Pasuruan	0.025036861
6	Kota Mojokerto	0.013605254
7	Kota Madiun	0.011083624
8	Kota Surabaya	0.342475559
9	Kota Batu	0.014005408

Sumber: Data Diolah, 2021

Perbedaan nilai IW ditunjukkan pada Tabel 2, kota di Provinsi Jawa Timur memiliki ketimpangan nilai yang bervariasi dari tahun 2010 sampai dengan 2019 dengan urutan kota yang memiliki nilai ketimpangan paling sedikit hingga terbesar adalah Kota Madiun dengan nilai rata-rata sebesar 0,011084, Kota Mojokerto sebesar 0,013605, Kota Batu sebesar 0,014005, Kota Blitar sebesar 0,016452, Kota Pasuruan sebesar 0,025037, Kota Probolinggo sebesar 0,026599, Kota Malang sebesar 0,050289, Kota Kediri sebesar 0,152515, dan terakhir Kota Surabaya sebesar 0,342476. Nilai IW yang rendah tidak berarti kesejahteraan masyarakat daerah tersebut lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dikarenakan IW menjelaskan distribusi PDRB perkapita antar kota tanpa menjelaskan seberapa besar distribusi PDRB perkapita ke PDRB Provinsi Jawa Timur.

### Hasil Tipologi Klassen

Setelah mengetahui ketimpangan dari masing-masing kota, selanjutnya akan dilakukan analisis tipologi kelas agar dapat mengetahui kategori tiap kota yang mengalami ketimpangan. Berdasarkan penghitungan data dan analisis tipologi kelas, dapat disimpulkan bahwa kota yang termasuk kedalam kategori daerah maju, dimana daerah yang dimaksud mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB adalah Kota

Surabaya, Batu dan Madiun. Hasil pengklasifikasian juga menunjukkan bahwa tidak adanya Kota di Provinsi Jawa Timur yang termasuk dalam kategori daerah maju tapi tertekan. Lalu kota yang termasuk kedalam kategori daerah berkembang yang dimana memiliki pertumbuhan yang tinggi namun memberikan kontribusi yang rendah terhadap PDRB Provinsi adalah Kota Kediri dan Malang. Terakhir Kota Blitar, Probolinggo, Pasuruan, dan Mojokerto termasuk kedalam daerah tertinggal yang dimana daerah tersebut tidak mengalami pertumbuhan yang tinggi dan hanya memberikan kontribusi yang rendah terhadap PDRB. Selain itu, kota yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal (kuadran IV) juga mengalami masalah ketimpangan pendapatan antar kota yang dapat menyebabkan adanya perpindahan penduduk ke daerah yang memiliki pendapatan lebih tinggi seperti di daerah kuadran I dan III. Jika hal ini terus menerus terjadi, maka perekonomian kota dengan rata-rata pendapatannya yang rendah akan lesu dan tingkat produktivitasnya juga menurun. Sementara Kota dengan tingkat pendapatan yang tinggi akan mengalami penambahan jumlah penduduk dan tingkat produktivitas yang tinggi. Karena wilayah perkotaan yang relatif kecil, maka pembangunan tempat usaha pun terbatas dan lapangan pekerjaan juga terbatas. Hal ini akan mengakibatkan permasalahan baru yaitu pengangguran dan kemiskinan.

#### **Hasil Location Quotient**

Untuk mengatasi permasalahan baru yang diakibatkan dari perpindahan penduduk inilah dilakukan perhitungan Location Quotient yang berfokus pada kategori daerah tertinggal yaitu Kota Blitar, Probolinggo, Pasuruan, dan Mojokerto untuk mengklasifikasi sektor yang dimiliki keempat kota tersebut kedalam sektor basis dan non-basis. Sebuah sektor dapat dikatakan sektor basis jika sektor tersebut memiliki nilai indeks LQ > 1. Penjelasan untuk tiap kota masing-masing sektor dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pertama Kota Blitar, sektor yang menjadi basis perekonomian adalah sektor informasi dan komunikasi, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Dari banyaknya sektor yang menjadi sektor basis di Kota Blitar, sektor informasi dan komunikasi memiliki nilai LQ paling tinggi diantara yang lainnya yaitu 4,35 dan dapat diartikan sebagai sektor paling potensial.
2. Kedua Kota Probolinggo, sektor yang menjadi basis perekonomian adalah pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estat, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Sektor yang paling potensial untuk dikembangkan adalah sektor transportasi dan pergudangan dengan nilai LQ sebesar 8,94.
3. Ketiga Kota Pasuruan, sektor basis yang dimiliki kota ini adalah sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, real estat, jasa pendidikan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan

sosial, jasa keuangan dan asuransi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Sektor yang paling berpotensi dengan nilai LQ sebesar 3,78 adalah sektor Transportasi Dan Pergudangan.

- Keempat Kota Mojokerto, sektor basis yang dimiliki kota ini adalah sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, administrasi pemerintahan, konstruksi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, perdagangan besar dan eceran, pertahanan dan jaminan sosial, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa pendidikan, real estat, dan jasa lainnya. Dari beberapa sektor basis yang telah disebutkan, ada satu sektor yang paling potensial yaitu sektor informasi dan komunikasi dengan nilai LQ sebesar 4,86.

### Hasil Shift Share

Dari keempat kota yang termasuk kedalam kategori daerah tertinggal, terdapat satu kota yang memiliki nilai LQ dan ketimpangan pendapatan terbesar diantara keempat kota yaitu Kota Probolinggo. Analisis *Shift Share* dilakukan pada kota ini dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan potensi dari sektor yang dimiliki kota Probolinggo sehingga pemerintah dapat berfokus mengembangkan sektor-sektor unggulan yang akan merangsang pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo. Berdasarkan hasil *shift share* yang telah dihitung dapat diklasifikasikan (1) Komponen pengaruh pertumbuhan provinsi (Nj), dimana seluruh sektor di Kota Probolinggo memiliki kontribusi yang *positive* terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dengan nilai total sebesar Rp 3.617.111,47 (juta rupiah). (2) Komponen bauran industry (Pj), terdapat 6 dari 17 sektor di Kota Probolinggo yang menghasilkan nilai *positive* yaitu Sektor transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa pendidikan, informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan, real estat, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, pertahanan dan jaminan sosial yang berarti bahwa pertumbuhan sektor-sektor ini di Kota Probolinggo *relative* cepat jika dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur. (3) Komponen perubahan (Dj) terdapat 8 dari 17 sektor di Kota Probolinggo bernilai *positive* yang berarti sektor-sektor ini mengalami peningkatan kontribusi lebih cepat atau berdaya saing lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain terhadap sektor yang sejenis. Kedelapan sektor ini adalah sektor pengadaan listrik dan gas, jasa pendidikan, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, administrasi pemerintahan, konstruksi, jasa perusahaan, perdagangan besar dan eceran, real estat, transportasi dan pergudangan, real estat, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, serta pertahanan dan jaminan sosial.

Selanjutnya, nilai *Shift Share* tiap sektor Kota Probolinggo menunjukkan hanya 8 dari 17 sektor yaitu sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, jasa pendidikan, transportasi dan pergudangan, pertahanan dan jaminan sosial, penyediaan akomodasi dan makan minum, administrasi pemerintahan, informasi dan komunikasi, real estat, jasa keuangan dan asuransi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa perusahaan yang menunjukkan percepatan pertumbuhan pada tahun 2010 hingga 2019. Total nilai SS yang diperoleh Kota Probolinggo bernilai

*positive* dimana perekenomian di kota tersebut telah mengalami pertumbuhan sebesar Rp 3.418.223,897 (juta rupiah) selama tahun 2010 hingga 2019.

Adanya persamaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Denny Iswanto (2015) yaitu “*Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur*” dimana ketimpangan pendapatan lebih banyak terjadi pada wilayah kota daripada kabupaten. Daerah dengan ketimpangan yang tinggi memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi terjadi di beberapa daerah salah satunya Kota Surabaya. Lalu, perbedaan dari penelitian terdahulu adalah fokus penelitian hanya pada wilayah kota di Provinsi Jawa Timur dengan perhitungan indeks Williamson secara mendalam pada tiap kota.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dijabarkan, maka akan diperoleh kesimpulan bahwa adanya kecenderungan peningkatan ketimpangan antarkota di Provinsi Jawa Timur dengan angka rata-rata sebesar 0,8 dimana hal tersebut menunjukkan ketimpangan yang dialami antar 9 Kota ini *relative* tinggi. Lalu dari kesembilan kota tersebut, terdapat 4 kota yang termasuk kedalam daerah tertinggal yaitu Kota Blitar, Probolinggo, Pasuruan, dan Mojokerto. Diantara keempat kota tersebut, terdapat satu kota yang memiliki nilai LQ dan nilai ketimpangan pendapatan yang tinggi yaitu Kota Probolinggo. Sektor unggulan dari hasil LQ dan SS yang dimiliki kota ini adalah sektor administrasi pemerintahan, perdagangan besar dan eceran, jasa pendidikan, pertahanan dan jaminan sosial, serta transportasi dan pergudangan. Sehingga diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan dengan lebih memprioritaskan sektor basis yang berdaya saing lebih tinggi.

## **SARAN**

Jika dilihat dari kesimpulan yang telah dijabarkan, maka diberikan saran yaitu tingginya ketimpangan pendapatan antarkota cenderung disebabkan oleh banyaknya daerah yang berada di kuadran I dan kuadran IV sehingga pemerintah harus lebih memperhatikan aspek pemerataan distribusi pendapatan dengan memberikan kebijakan yang memprioritaskan daerah yang *relative* tertinggal (kuadran IV) namun tetap tidak mengabaikan daerah yang *relative* maju (kuadran I). Selain itu, pembangunan pada sektor-sektor yang potensial juga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi terutama di daerah yang *relative* tertinggal.

## **REFERENSI**

- Arif, M., Wicaksana, R. A. 2017. Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. *University Research Colloquium*. 323-328.
- Arsyad, L. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Asih, W. 2015. Analisis Ketimpangan Dalam Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. *Jumlah Penduduk Tahun 2010-2019*. Jawa Timur: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2019*. Jawa Timur: BPS.
- Cahyono, H., Subroto, W.P., Anwar, K. 2017. Income Disparity in Gerbangkertosusila Area of East Java Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*. 7(1): 14-18.
- Hawa, S. 2018. Analisis Sektor Basis Dan Posisi Sektor Ekonomi Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Periode 2011-2015. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Iswanto, D. 2015. Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur. 4 (1): 41-66.
- Parel. D.K.C. 2014. Growth and Redistribution: Is there 'Trickle Down' Effect in the Philippines?. *Philippine Institute for Development Studies*. 2: 1-26.
- Puspitarini, R. C., Anggraini, I. 2019. Trickle-Down Economics' Arthur Lewis Fails: An Economic Development Study of Mount Bromo in Ngadisari Village, Sukapura District, Probolinggo Regency, East Java. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*. 7 (3): 131-139.
- Putra, K.E.B., 2019. Analisis Sektor Basis Ekonomi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Surabaya Tahun 2013-2016. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Rini, O. S. P., Khoirudin, R. 2020. Analisis Sektor Unggulan Di Kabupaten/Kota Se-Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2016. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. 17 (1): 15-23.
- Sari, A.I. 2017. Analisis Peranan Sektor Ekonomi Basis Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2015. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sjafrizal. 2018. *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sowell, T. 2012. *"Trickle Down" Theory and "Tax Cuts for the Rich"*. Amerika: Hoover Institution Press Publication.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Adi. 2012. Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Pengembangan Sektor Unggulan Di Kabupaten Dalam Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2007-2010. *Economics Development Analysis Journal*. 1(1): 42-49.
- Tarigan, R. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Yuendini, E., dkk. 2019. Analisis Potensi Ekonomi Sektor Pertanian dan Sektor Pariwisata di Provinsi Bali Menggunakan Teknik Analisis Regional. *Jurnal Geografi*. 16(2): 128-136.